



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 124 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN**

**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa, perlu dilaksanakan kegiatan penilaian indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penilaian indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Unit Organisasi Eselon II sebagai Pengampu Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Tim Sekretariat:

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- b. menyiapkan kertas kerja Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dan menyiapkan tempat penyimpanan bukti dukung Indeks Kualitas Kebijakan secara digital;
- c. memperbarui bukti dukung Indeks Kualitas Kebijakan;
- d. menjadi *counterpart* bagi Unit Organisasi Eselon II Pengampu Kebijakan atau Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- e. menyiapkan kebutuhan Narasumber untuk membantu memberi penjelasan dalam penyusunan bukti dukung Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- f. melakukan koordinasi dengan LAN terkait penyiapan sistem informasi Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
- g. mengidentifikasi relevansi bukti dukung dengan indikator penilaian IKK sesuai dengan *Toolkit* Indeks Kualitas Kebijakan yang telah disediakan oleh LAN.

2. Tim Pelaksana:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dalam bentuk

namun tidak terbatas pada telaahan staf, *policy brief*, *policy paper*, atau laporan pemantauan dan evaluasi;

- b. membahas relevansi bukti dukung dengan indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan *Toolkit* Indeks Kualitas Kebijakan yang telah disediakan oleh LAN; dan
- c. Melakukan proses input bukti dukung ke dalam sistem informasi Indeks Kualitas Kebijakan.

3. Tim Verifikator:

- a. melakukan verifikasi bukti dukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
- b. melakukan verifikasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Masa Kerja Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS  
KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2022

NOMOR : 124 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

DAFTAR PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH YANG MASUK DALAM KRITERIA PENILAIAN  
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2022

No	Peraturan	Pengampu Penilaian IKK
1.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Sistem Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
2.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ
3.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
4.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

<b>No</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Pengampu Penilaian IKK</b>
	2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengadaan, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah dan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
6.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
7.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengadaan PBJ	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
8.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia PBJ	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Direktorat Sertifikasi Profesi
9.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog dan Direktorat Sistem Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
11.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

<b>No</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Pengampu Penilaian IKK</b>
12.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
13.	Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Internasional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
14.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS  
KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2022

NOMOR : 124 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2022

<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>
Pengarah 1	: Sarah Sadiqa
Pengarah 2	: Robin Asad Suryo
Ketua	: Emin Adhy Muhaemin
Sekretariat	: Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Pelaksana	: 1. Antonius Lambok Sihombing 2. Rusli Maryadi 3. Edi Kristiyanto 4. Dodi Wahyugi 5. Zuhlenny 6. Yuyu Yulianti 7. Erlangga Aninditya 8. Fajar Adi Hermawan 9. Mustika Rosalina Putri 10. Januar Indra 11. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 12. Tjipto Prasetyo Nugroho 13. Arif Budiman Anwar 14. Arif Rachman 15. Windy Dian Trisari 16. Octo Army

Kedudukan dalam Tim	Nama
	<ol style="list-style-type: none"><li>17. Ilvia Restu Utami</li><li>18. Deasy Rachmawati</li><li>19. Lailatul Mufarokhah</li><li>20. Thanthawi Jauhari</li><li>21. Widya Prima Sari Fultanegara</li><li>22. Sugianto</li><li>23. Anatasia</li><li>24. Yohana Surat Rayon Philips</li><li>25. Febrita Sidabalok</li><li>26. Imam Arumsyah</li><li>27. Nuraini Darmastuti</li><li>28. Febri Kamalisa Rahman</li><li>29. Satriyo Wibowo</li><li>30. Fenita Enggraini</li><li>31. Cecep Hendar Supriadi</li><li>32. Andi Darmawan</li><li>33. Eva Sinaga</li><li>34. Andy Purwa Sejati</li><li>35. Andi Rannualdi</li><li>36. Annisa Putri</li><li>37. Yasmine Permata Sari</li><li>38. Budi Bowo Laksono</li><li>39. Ayu Rosalina Wibowo</li></ol>
Verifikator	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspektorat sebagai Ketua</li><li>2. Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagai Anggota</li></ol>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS